

## Laporan Keuangan KKR ✓ Dapat Pujian Depkeu

Kubu Raya, BERKAT.

Laporan keuangan Kubu Raya mendapat pujian dari Departemen Keuangan dikarenakan tepat waktu dalam penyampaiannya. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD) Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Yusrizal Ilyas mengatakan laporan keuangan yang diselesaikan Pemerintah Kubu Raya tepat waktu itu seperti penetapan APBD.

"Ini sangat baik sekali. Artinya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak sembarangan dalam penyelesaian keuangannya. Kalau laporan keuangan itu terlambat maka daerah tersebut akan



YUSRIZAL



SUTRISNO

(19/4). Pun demikian ia memaklumi dalam pengelolaan keuangannya masih dibutuhkan perbaikan. Ini dikarenakan Kubu Raya sebagai kabupaten baru masih minim SDM dan sarana pendukung.

"Memang pada tahun lalu opini BPK RI menyebutkan pengelolaan laporan keuangan Kubu Raya disclaimer. Akan tetapi

dikenai sanksi berupa pemotongan DAK 25 persen per bulannya dan tidak mendapat DAU sama sekali," kata Yusrizal disela sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak Kubu Raya, Selasa

LANJUTAN BACA HAL 11

### Laporan Keuangan KKR Dapat Pujian.....dari Hal 1

sebagai kabupaten baru masih minim SDM dan sarana pendukung.

"Memang pada tahun lalu opini BPK RI menyebutkan pengelolaan laporan keuangan Kubu Raya disclaimer. Akan tetapi kita harapkan tahun ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi," pintanya.

Menurut dia, Kubu Raya perlu lagi belajar lebih banyak tentang pencatatan pembukuan yang ditunjang dengan peningkatan Sumber Daya Manusianya serta sarana pendukung.

"Tapi kedepannya kami akan terus membantu melakukan pembinaan atau kerja sama dalam bentuk pendidikan dan latihan," tuturnya.

Ia sebutkan secara nasional tahun ini ada 19 daerah tahun ini baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota yang dikenai pemotongan DAK dan DAU. Namun dari 524 daerah di seluruh Indonesia tidak semuanya melaporkan keuangannya dengan baik.

"Untuk Kalbar sendiri tidak ada satu pun yang dikenai sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan ke-

uangannya," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PPKAD Kubu Raya, Sutrisno mengatakan dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah, Kubu Raya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 15. Menurut dia, opini disclaimer BPK RI asumsinya berada posisi di bawah atau ketiga.

"Namun kita tetap bekerja maksimal untuk memperbaikinya. Dan dalam penyampaian keuangan indikatornya sebelum tanggal 31 Desember sehingga tepat waktu," katanya.

Ia berharap pada tahun ini akan ada perubahan dan secara bertahap dilakukan perbaikan sehingga tidak lagi muncul opini seperti tahun sebelumnya.

"Itu semua untuk memacu kita memperbaikinya. Dan kita bertekad tahun ini mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," tuturnya.

Kendati mendapat opini disclaimer namun pada tahun lalu Kubu Raya berhasil mendapatkan dana-dana yang bersumber dari pusat seperti DAK dan DAU. (rob)